

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LKIP Tahun 2017 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.

LKIP Tahun 2017 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja selama tahun 2017 atau tahun ke-4 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. LKIP 2017 telah menggunakan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Bapenda Provinsi Jawa Barat yang akan dituangkan pada penyusunan LKIP Tahun 2017.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2013-2018, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2017 ditetapkan 9 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

Kesembilan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Tercapainya penerimaan pendapatan daerah;
2. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah;
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan ;
6. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah;
7. Menigkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah;
8. Menigkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja;
9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM).

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan kinerja pada tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kompetensi pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan;;
3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelolaan pendapatan.

Pencapaian Rencana Stratejik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 1 (satu) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

Pada Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 672.384.584.673,00 dengan realisasi sebesar Rp. 643.472.630.082,00 (95,70%) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	332.151.489.673,00	309.779.509.648,00	93,26
Belanja Tidak Langsung	340.233.095.000,00	333.693.120.434,00	98,08
Total Biaya	672.384.584.673,00	643.472.630.082,00	95,70

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang telah diraih 6 (enam) kali berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di tahun 2018 ini kita berusaha untuk kembali meraih WTP yang ketujuh kali, hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Jawa Barat ketika memberikan arahan pada kegiatan pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratif dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Februari 2018, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meraih kembali Opin WTP dari BPK-RI yang ketujuh kali sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan

kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Bandung, 29 Maret 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

H. DADANG SUHARTO, SH., MM
Pembina Utama
NIP. 19580823 198603 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sumber segala ilmu pengetahuan dan akal budi yang diberikan kepada insan abdi negara dan abdi masyarakat karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini telah menggunakan nomenklatur baru Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Bapenda Provinsi Jawa Barat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 berisi paparan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dengan Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2017, kami menyadari meskipun menyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan serta implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LKIP TA 2017 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menembus putaran waktu dengan inovasi, semangat perubahan Bapenda Provinsi Jawa Barat menjawab tantangan perkembangan teknologi dengan layanan yang smart dan inovatif.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

H. DADANG SUHARTO, SH., MM
Pembina Utama
NIP. 19580823 198603 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pertolongan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Perubahan dari UUD No. 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
10. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060.04/189/Org Tanggal 25 Januari 2017 Perihal Penyusunan LKIP Tahun 2017.

1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pendapatan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Badan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

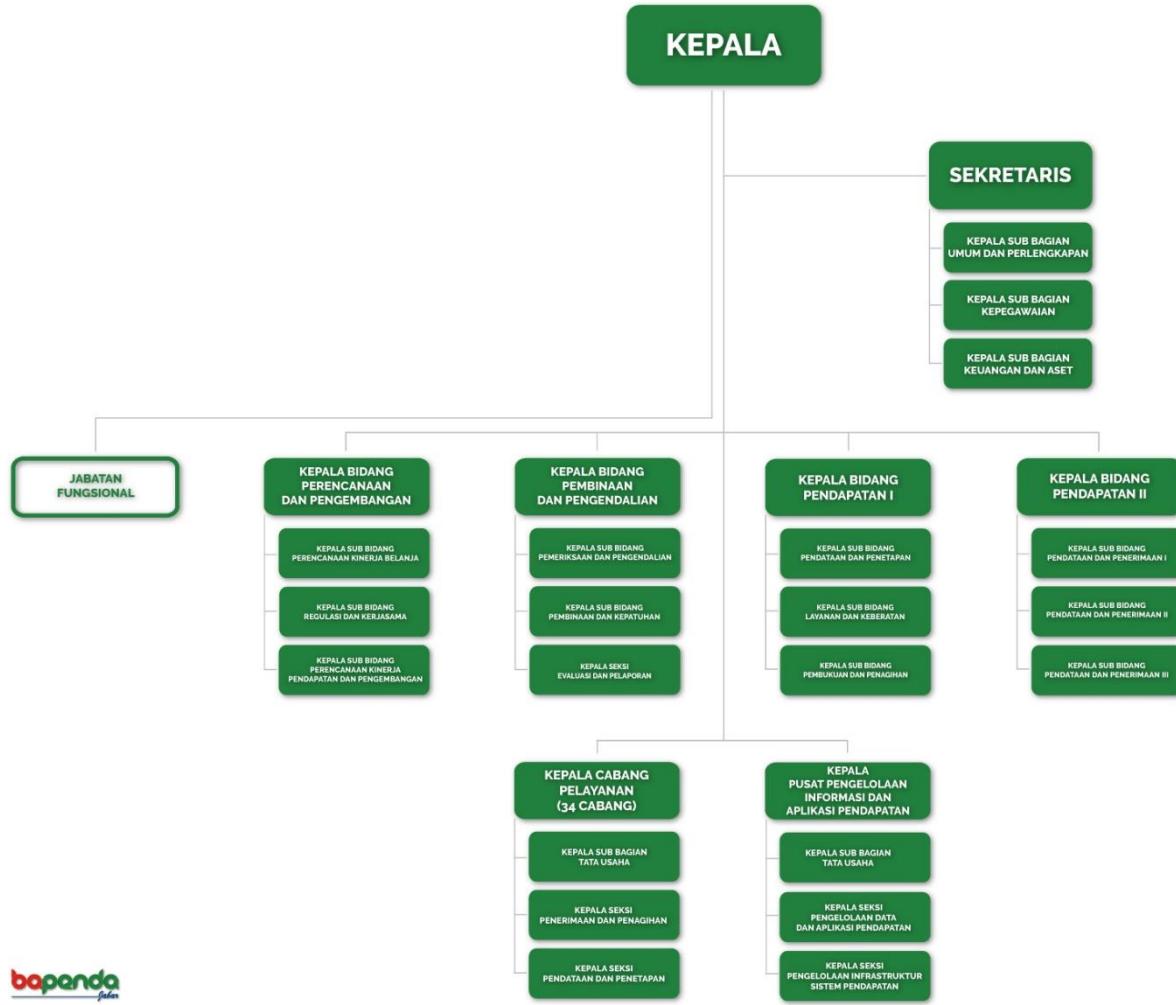
Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris

- a. Subbagian Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - a. Subbidang Regulasi dan Kerjasama
 - b. Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan
 - c. Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja
 4. Bidang Pendapatan I
 - a. Subbidang Pendapatan dan Penetapan
 - b. Subbidang Layanan dan Keberatan
 - c. Subbidang Pembukuan dan Penagihan
 5. Bidang Pendapatan II
 - a. Subbidang Pendataan dan Penerimaan I
 - b. Subbidang Pendataan dan Penerimaan II
 - c. Subbidang Pendataan dan Penerimaan III
 6. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - a. Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan
 - b. Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Sumber : bapenda.jabarprov.go.id)

Core Business Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
- 3) Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 5) Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan Starta I (S-1) sebanyak 342 orang (38,23%), Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 182 orang (20,66%), Diploma III sebanyak 32 orang (3,63%)

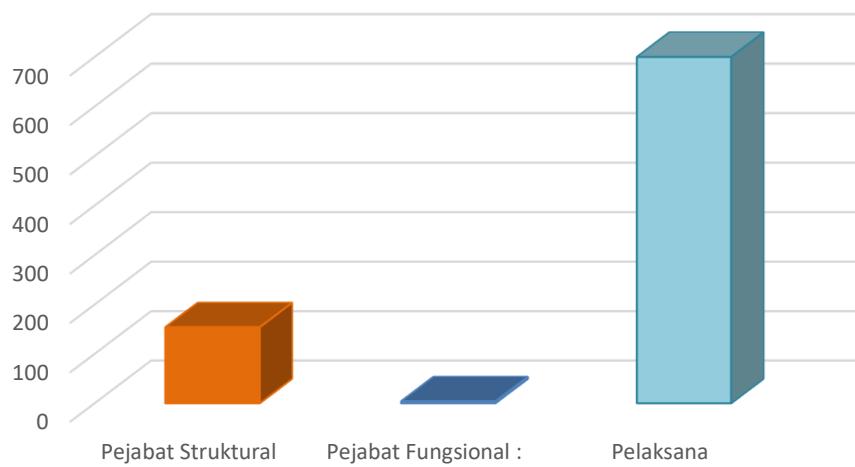
Jumlah total pegawai yang memiliki pendidikan terakhir lulusan perguruan tinggi sebanyak 556 orang atau sebesar 63,11% .

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pejabat Struktural	154 orang	17,95
2.	Pejabat Fungsional : A. Fungsional Pustakawan B. Arsiparis	3 orang 1 orang	0,35 0,12
3.	Pelaksana	700 orang	81,59
	Total	858 orang	100,00

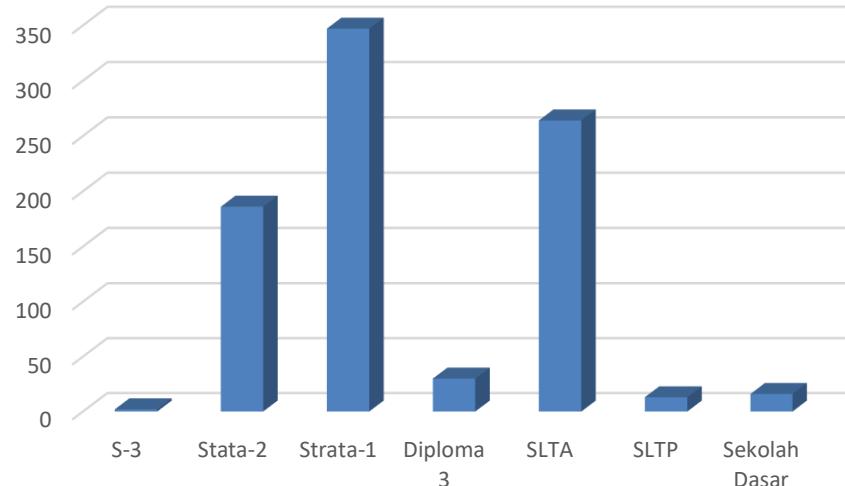
1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan



2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	S-3	2	0,23
2.	Stata-2	186	21,68
3.	Strata-1	347	40,44
4.	Diploma 3	30	3,50
5.	SLTA	264	30,77
6.	SLTP	13	1,52
7.	Sekolah Dasar	16	1,86
8.	Jumlah	858	100,00

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pria	678	79,02
2.	Wanita	180	20,98

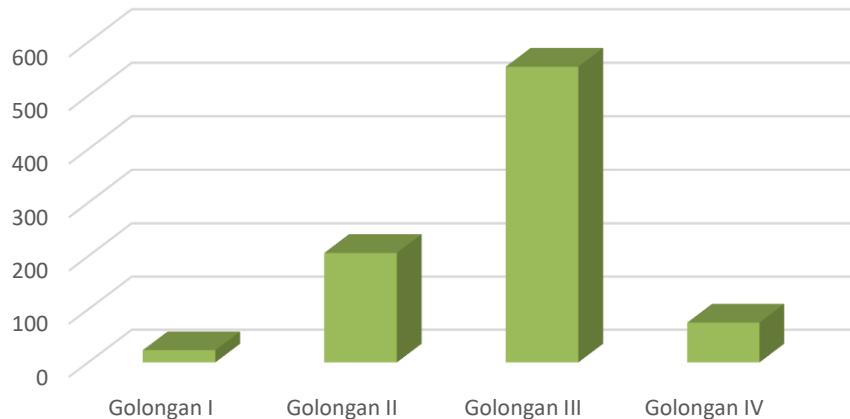
	Jumlah	858	100,00
--	--------	-----	--------



4. Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Golongan I	23	2,68
2.	Golongan II	206	24,01
3.	Golongan III	554	64,57
4.	Golongan IV	75	8,74
	Jumlah	858	100

4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II **PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Indikator Kinerja Utama
- 3) Cascading
- 4) Pohon Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan badan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan jangka panjang daerah provinsi Jawa Barat yaitu "**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**" hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, dan penyempurnaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pendapatan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) 2013 - 2018, maupun dalam kebijakan strategis bidang pendapatan daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian visi dan misi organisasi pada tahun 2013-2018.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dijewi oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pengelolaan pendapatan daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah
dan Akuntabel**

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing**

2.1.2 Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Badan Pendapatan Daerah Yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran Diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu-isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Untuk Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang makin Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan Penerimaan Daerah yang makin optimal, dengan Sasaran : tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikatornya Yaitu :
 - a) Kenaikan pendapatan daerah antara tahun anggaran
 - b) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)
2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran :
 - a) Terdatanya potensi Pajak Daerah dan bukan Pajak Daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Air Permukaan
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Jumlah Wajib Retribusi
 - b) Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah

- c) Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Potensi wajib pajak yang terpungut
 - 2) Potensi Wajib Retribusi yang terpungut
 - 3) Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

Untuk Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing, tujuan yang dirumuskan meliputi :

- 1. Meningkatkan kemampuan Aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
 - a) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
 - b) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan fungsional
 - c) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
- 2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b) Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya :
 - 1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran.
 - 2) Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan
 - 3) Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan
 - c) Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Tingkat gangguan jaringan dan sistem
 - 2) Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras teknologi Informasi
- 3. Memantafkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya Sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Prosentase perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan
 - b) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya
 - 1) Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)
 - 2) Jumlah temuan SPI antar tahun
 - 3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Internal pengawasan
 - 4) Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh instansi Penilai

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2013-2018 hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
- b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;
- c. Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
- d. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;
- e. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
- f. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- g. Peningkataan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;
- h. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur pemerintah pusat;
- i. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;
- j. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
- k. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- l. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder;
- m. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- n. Memberlakukan *system reward* untuk pencapaian kinerja organisasi;
- o. Menerapkan SOP yang makin teruji;
- p. Melakukan standarisasi sasaran pengelolaan pendapatan;
- q. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas publik;
- r. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- s. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- t. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

2. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat

Untuk mengawali pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapainnya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;
- b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
- c. Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN dan PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;
- d. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
- e. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan;
- g. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
- h. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan di bidang perpajakan dan retribusi;
- i. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
- j. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
- k. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
- l. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
- m. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh Perangkat Daerah penghasil;
- n. Menyempurnakan *system reward* pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
- o. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- p. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
- q. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat) ;
- r. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas (t – Samsat) (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama leasing, tabungan kerjasama leasing/kredit pembiayaan lainnya) ;
- s. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
- t. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
- u. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah;
- v. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji;

Keterkaitan visi, misi hingga kebijakan operasionalnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 10 (sepuluh) program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Program 100 Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
2. Program 101 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
3. Program 102 Pengembangan Kompetensi Aparatur
4. Program 103 Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
5. Program 107 Pembinaan Dan Pengawasan
6. Program 109 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
7. Program 110 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
8. Program 111 Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program 98 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
10. Program 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 11 (sebelas) program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan Tahun 2017, sebagai berikut :

Kinerja Organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mengetahui Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Tabel Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1. Persentase kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran 2. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana Boss)	10 % 85 %
2.	Terdatanya potensi penerimaan daerah	1. Jumlah potensi wajib pajak/wajib pungut: a. PKB b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar 2. Jumlah Potensi Wajib Retribusi 3. Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	17.6 Juta Kbm 785 WP 26 Wapu 160 WR 35 objek
3.	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	1. Persentase potensi wajib pajak yang terpungut 2. Persentase potensi wajib retribusi yang terpungut 3. Persentase Objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	75% 90% 100%
4.	Meningkatnya kualitas Aparatur	1. Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal 2. Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif 3. Persentase aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	S1 = 38,2% S2 = 20,66 % 78% 12%
5.	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,7%
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pendapatan daerah	1. Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	1:300 95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		2. Persentase ketersediaan standar operasional prosedur terhadap kebutuhan 3. Persentase ketersediaan standar pelayanan terhadap kebutuhan	90%
7.	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	1. Persentase tingkat gangguan jaringan dan sistem 2. Persentase tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	1,4% 1,4%
8.	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	90%
9.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	1. Persentase tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan 2. Persentase penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) 3. Temuan SPI antar tahun 4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan 5. Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh instansi penilai	5% 96% 300 temuan 100% 83

Didukung oleh 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	28.984.539.308	APBD
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	304.355.000	APBD
3.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	2.389.150.000	APBD
4.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	2.484.450.000	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1.138.060.000	APBD
6.	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	59.641.513.017	APBD
7.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	164.895.014.724	APBD
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.215.607.624	APBD
9.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	455.650.000	APBD
10.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	643.150.000	APBD
Jumlah		Rp. 332.151.489.673,00	

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berikut anggaran yang tersedia untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 23 Sasaran Strategis ditetapkan 9 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.

2.3 Dukungan Anggaran Program Kegiatan

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang danganngkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 544 (lima ratus empat puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	100	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	28.984.539.308	25.347.411.162	87.45
100	001	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	265.650.000	263.525.000	99.20
100	002	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	233.500.000	233.425.000	99.97
100	003	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1.238.530.000	1.084.280.000	87.55
100	004	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	337.400.000	336.820.000	99.83
100	005	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	496.667.500	377.667.500	76.04
100	006	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1.046.900.000	897.192.500	85.70
100	007	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	613.780.500	561.980.500	91.56
100	008	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1.332.630.000	897.425.800	67.34
100	009	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	428.100.000	366.080.000	85.51
100	010	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	673.150.000	636.509.800	94.56

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	011	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.094.032.500	858.210.500	78.44
100	012	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	648.500.000	563.474.800	86.89
100	013	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1.169.487.500	860.783.000	73.60
100	014	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	290.657.500	270.040.000	92.91
100	015	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	882.537.500	797.592.500	90.37
100	016	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	677.017.500	609.311.300	90.00
100	017	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	912.862.500	801.746.250	87.83
100	018	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	456.215.000	416.165.000	91.22
100	019	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	997.171.400	855.953.900	85.84
100	020	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.020.958.408	926.782.500	90.78
100	021	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	554.382.500	525.626.000	94.81
100	022	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	585.232.500	549.182.500	93.84
100	023	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	509.247.500	505.966.000	99.36
100	024	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	626.282.500	561.545.000	89.66
100	025	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	708.725.000	624.500.000	88.12
100	026	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	641.872.500	568.662.100	88.59

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	027	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	983.091.000	875.333.500	89.04
100	028	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1.215.080.500	1.166.530.500	96.00
100	029	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	626.585.000	403.277.500	64.36
100	030	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1.317.117.500	1.160.963.500	88.14
100	031	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	826.152.500	655.030.000	79.29
100	032	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	499.640.000	430.090.000	86.08
100	033	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	273.390.000	244.940.500	89.59
100	034	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	279.892.500	254.060.000	90.77
100	035	Kegiatan Anugrah Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat	1.349.560.000	1.334.661.400	98.90
100	036	Kegiatan Rapat Kerja Pendapatan Daerah	566.800.000	434.196.600	76.60
100	037	Kegiatan Sosialisasi Dan Monitoring Pajak Daerah	403.300.000	367.177.750	91.04
100	038	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendapatan II	836.990.000	766.388.264	91.56
100	039	Kegiatan Pengayaan Instrumen Pelayanan Pendapatan	822.950.000	782.534.807	95.09
100	040	Kegiatan Kajian Regulasi Pendapatan Dan Rapat Kerjasama Pendapatan	542.500.000	521.779.391	96.18
101	101	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	304.355.000	263.016.500	86.42
	001	Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja Dan Pelaporan Internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	304.355.000	263.016.500	86.42
102	102	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	2.389.150.000	1.853.949.759	77.60

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	001	Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Uji Kompetensi Aparatur Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	2.389.150.000	1.853.949.759	77.60
103	103	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	2.484.450.000	2.356.813.850	94.86
103	001	Kegiatan Penyediaan Uang Saku Diklat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	29.400.000	25.650.000	87.24
103	002	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Dan Material Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	103.650.000	96.671.100	93.27
103	003	Kegiatan Penyediaan Belanja Jasa Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	190.300.000	161.090.000	84.65
103	004	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	11.700.000	9.998.250	85.46
103	005	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	33.000.000	33.000.000	100.00
103	006	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Dan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	2.027.650.000	1.968.054.500	97.06
103	007	Kegiatan Penyediaan Biaya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	38.750.000	38.750.000	100.00
103	008	Kegiatan Pembinaan Kerohanian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	50.000.000	23.600.000	47.20
107	107	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1.138.060.000	1.042.225.600	91.58
	001	Kegiatan Pemeriksaan, Pemutahiran Dan Pendampingan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.138.060.000	1.042.225.600	91.58
109	109	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	59.641.513.017	55.887.462.547	93.71
109	001	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	706.868.464	674.630.000	95.44
109	002	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	2.672.128.688	2.461.570.079	92.12
109	003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.051.952.100	949.373.500	90.25
109	004	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	3.762.290.000	3.343.043.865	88.86

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	005	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	7.043.025.000	6.688.463.650	94.97
109	006	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	94.049.060	79.204.100	84.22
109	007	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	658.153.364	635.114.400	96.50
109	008	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	110.202.700	83.975.400	76.20
109	009	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	16.437.960	12.453.000	75.76
109	010	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	62.376.816	59.742.000	95.78
109	011	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	662.605.500	624.694.500	94.28
109	012	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	58.895.000	58.861.551	99.94
109	013	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	66.200.000	65.832.000	99.44
109	014	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	1.518.810.000	1.494.014.000	98.37
109	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	175.460.000	147.673.000	84.16
109	016	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	643.907.945	612.748.228	95.16
109	017	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	201.000.000	159.564.800	79.39
109	018	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	76.500.000	69.650.000	91.05
109	019	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1.163.470.203	1.148.328.400	98.70
109	020	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	96.037.500	73.944.900	77.00

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	021	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	554.100.000	541.366.800	97.70
109	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	77.300.000	73.023.938	94.47
109	023	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	22.712.807	15.175.000	66.81
109	024	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	71.020.000	71.020.000	100.00
109	025	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	420.046.500	412.913.460	98.30
109	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	72.600.000	70.942.900	97.72
109	027	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	17.292.436	17.180.000	99.35
109	028	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	7.000.000	6.930.000	99.00
109	029	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	125.300.000	94.121.000	75.12
109	030	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	515.500.000	508.252.600	98.59
109	031	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	84.802.000	58.913.599	69.47
109	032	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	32.532.310	29.261.000	89.94
109	033	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	49.000.000	48.996.766	99.99
109	034	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	486.767.374	477.624.080	98.12
109	035	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	91.005.750	86.847.530	95.43

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	036	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	50.739.268	50.729.250	99.98
109	037	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	141.500.000	139.697.000	98.73
109	038	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	148.973.300	104.647.233	70.25
109	039	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	349.566.200	347.824.000	99.50
109	040	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	94.022.500	76.212.038	81.06
109	041	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	47.198.000	31.795.000	67.37
109	042	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	107.031.048	106.138.000	99.17
109	043	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	117.300.000	117.230.000	99.94
109	044	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1.902.160.535	1.902.160.535	100.00
109	045	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	88.700.000	88.426.908	99.69
109	046	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	415.800.000	411.430.915	98.95
109	047	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	69.372.201	55.599.400	80.15
109	048	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	621.111.556	618.461.556	99.57
109	049	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	91.989.000	64.566.350	70.19
109	050	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	284.922.000	113.676.000	39.90
109	051	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	551.800.000	529.160.000	95.90

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	052	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	47.600.000	47.343.815	99.46
109	053	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	750.159.359	745.127.909	99.33
109	054	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	94.500.000	86.983.400	92.05
109	055	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	58.867.187	57.697.000	98.01
109	056	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	10.000.000	9.726.200	97.26
109	057	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	58.258.070	56.930.000	97.72
109	058	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	698.158.206	697.410.987	99.89
109	059	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	92.092.599	90.682.765	98.47
109	060	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	117.200.000	105.426.000	89.95
109	061	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	224.500.000	214.104.000	95.37
109	062	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	104.889.592	101.492.000	96.76
109	063	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	559.410.880	556.738.680	99.52
109	064	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	121.500.000	109.127.300	89.82
109	065	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	64.850.000	63.608.820	98.09
109	066	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	452.459.000	449.285.000	99.30
109	067	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	90.900.000	67.350.939	74.09

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	068	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	504.990.000	494.179.821	97.86
109	069	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	112.000.000	58.251.048	52.01
109	070	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	97.400.000	65.770.000	67.53
109	071	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	163.816.728	158.394.000	96.69
109	072	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	53.100.000	49.071.520	92.41
109	073	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	486.471.090	484.223.490	99.54
109	074	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	61.631.400	46.701.636	75.78
109	075	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	121.600.000	65.685.000	54.02
109	076	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	62.743.047	35.084.800	55.92
109	077	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	49.550.000	46.968.087	94.79
109	078	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	513.197.020	508.293.812	99.04
109	079	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	28.050.000	23.057.092	82.20
109	080	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	63.000.000	52.475.000	83.29
109	081	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	243.830.246	239.891.000	98.38
109	082	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	83.020.000	75.432.667	90.86

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	083	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	519.769.650	518.865.950	99.83
109	084	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	114.260.000	89.523.579	78.35
109	085	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	56.299.207	49.660.000	88.21
109	086	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	78.840.000	77.564.800	98.38
109	087	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	402.580.000	401.046.800	99.62
109	088	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	85.724.000	84.622.228	98.71
109	089	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	44.111.493	43.980.000	99.70
109	091	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	129.390.000	92.263.174	71.31
109	092	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	458.267.000	445.740.980	97.27
109	093	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	106.642.000	55.380.385	51.93
109	094	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	58.066.030	50.585.000	87.12
109	095	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	155.253.200	92.242.623	59.41
109	096	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	340.430.734	330.768.614	97.16
109	097	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	72.711.500	31.805.554	43.74
109	098	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	45.350.000	41.754.000	92.07

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	099	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	437.436.728	423.232.000	96.75
109	100	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	167.960.000	141.155.128	84.04
109	101	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	681.665.640	676.295.280	99.21
109	102	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	117.045.000	93.089.100	79.53
109	103	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	147.400.000	144.833.500	98.26
109	104	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	730.250.000	715.975.700	98.05
109	105	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	138.194.442	136.426.550	98.72
109	106	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	635.392.987	617.231.192	97.14
109	107	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	102.526.000	96.086.298	93.72
109	108	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	105.400.000	103.447.600	98.15
109	109	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	797.953.169	780.265.000	97.78
109	110	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	65.100.000	60.833.933	93.45
109	111	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	632.985.422	630.844.400	99.66
109	112	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	55.000.000	52.186.364	94.88
109	113	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	70.870.000	69.956.000	98.71

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	114	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	863.631.000	849.798.650	98.40
109	115	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	154.156.000	116.954.159	75.87
109	116	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	609.467.566	582.733.161	95.61
109	117	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	102.591.500	60.664.900	59.13
109	118	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	61.180.000	59.885.000	97.88
109	119	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	2.086.986.225	1.875.424.800	89.86
109	120	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	121.988.650	112.376.230	92.12
109	121	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	592.105.770	581.301.510	98.18
109	122	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	83.863.000	64.833.270	77.31
109	123	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	108.000.000	105.940.000	98.09
109	124	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	135.907.000	129.651.000	95.40
109	125	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	66.700.000	66.634.200	99.90
109	126	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	550.500.000	538.447.300	97.81
109	127	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	47.400.000	44.839.978	94.60
109	128	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan	74.568.006	74.397.000	99.77

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang			
109	129	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	40.000.000	37.709.500	94.27
109	130	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	108.160.000	83.553.000	77.25
109	131	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	780.325.691	715.040.333	91.63
109	132	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	68.232.600	37.242.214	54.58
109	133	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	104.472.000	103.422.000	98.99
109	134	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	27.549.373	26.650.000	96.74
109	135	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	87.260.000	56.630.400	64.90
109	136	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	516.850.000	512.804.003	99.22
109	137	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	75.900.000	32.435.900	42.74
109	138	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	64.000.000	47.618.800	74.40
109	139	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	668.966.107	587.467.000	87.82
109	140	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	86.252.500	86.192.252	99.93
109	141	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	439.731.750	436.080.994	99.17
109	142	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	87.672.000	87.672.000	100.00
109	143	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	58.000.000	57.498.800	99.14

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	144	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	337.232.000	327.911.500	97.24
109	145	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	66.049.000	66.035.000	99.98
109	146	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	494.389.660	490.813.440	99.28
109	147	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	73.600.000	73.420.400	99.76
109	148	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	33.000.000	32.975.000	99.92
109	149	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	10.000.000	10.000.000	100.00
109	150	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	67.808.910	62.965.000	92.86
109	151	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	416.842.141	405.814.285	97.35
109	152	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	105.648.959	92.473.400	87.53
109	153	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	93.750.000	69.738.000	74.39
109	154	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	331.800.000	314.439.000	94.77
109	155	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	233.205.157	128.129.110	54.94
109	156	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	396.050.000	385.767.400	97.40
109	157	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	144.400.000	96.110.718	66.56
109	158	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	84.300.000	84.000.000	99.64
109	159	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah	775.765.200	745.539.700	96.10

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran			
109	160	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	65.298.463	53.950.200	82.62
109	161	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	616.948.510	615.318.310	99.74
109	162	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	72.000.000	59.118.900	82.11
109	163	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	120.000.000	101.657.000	84.71
109	164	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	434.293.000	428.486.000	98.66
109	165	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	110.053.845	94.055.000	85.46
109	166	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	335.237.950	321.302.655	95.84
109	167	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	81.522.500	60.574.300	74.30
109	168	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	67.581.457	47.861.500	70.82
109	169	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	95.000.000	92.535.000	97.41
109	170	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	222.100.000	218.014.788	98.16
109	171	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Profesi Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	393.247.816	390.522.204	99.31
109	172	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	136.456.000	103.585.132	75.91
109	173	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	424.750.000	402.911.500	94.86
109	174	Pemeliharaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1.172.492.000	1.158.665.000	98.82
109	175	Pemeliharaan Konstruksi di CPPD Wil. Kab Sukabumi I Cibadak	466.120.000	457.495.000	98.15

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	110	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	164.895.014.724	155.854.862.616	94.52
110	001	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	40.776.728.325	36.579.284.201	89.71
110	002	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Meubeulair, Dan Peralatan Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	1.628.300.000	1.616.867.000	99.30
110	003	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Meubeulair, Alat Studio, Dan Alat Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	436.159.626	425.658.437	97.59
110	004	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dapur Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	693.893.157	645.825.100	93.07
110	005	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	65.000.000	60.967.000	93.80
110	006	Kegiatan Penyusunan Ded Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	601.041.741	465.364.000	77.43
110	007	Kegiatan Pengadaan Alat Studio, Meubeulair, Dan Alat Komunikasi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	123.300.000	118.195.000	95.86
110	008	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Peralatan Dapur, Dan Aksesoris Komputer Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	114.515.637	101.207.000	88.38
110	009	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Komputer, Meubeulair, Dan Penghias Ruangan Rumah Tangga Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	2.001.200.000	1.821.048.772	91.00
110	010	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Meubeulair, Komputer, Dan Peralatan Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	682.384.876	660.503.000	96.79
110	011	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	686.724.000	670.599.000	97.65
110	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Peralatan Dapur, Dan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	45.500.000	39.500.000	86.81
110	013	Kegiatan Penyusunan Ded Gedung Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	646.920.640	601.689.000	93.01

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	014	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Komputer, Dan Meubeulair Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	857.455.600	836.462.300	97.55
110	015	Kegiatan DED Mess Karyawan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	284.962.000	284.962.000	100.00
110	016	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	168.500.000	158.891.400	94.30
110	017	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pematangan Lahan Parkir Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	1.697.756.787	1.505.263.391	88.66
110	019	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Komputer, Alat-Alat Studio, Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	265.910.965	240.123.900	90.30
110	020	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jalan Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	235.900.000	225.500.000	95.59
110	021	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Dan Alat-Alat Studio Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	218.445.000	216.341.000	99.04
110	022	Kegiatan Pengadaan Kontruksi Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	632.579.000	625.124.000	98.82
110	023	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Komputer, Meubeulair Dan Penghias Ruangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	171.959.274	168.100.000	97.76
110	024	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	436.589.200	428.145.000	98.07
110	025	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	114.520.000	109.721.900	95.81
110	026	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Meubeulair Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	105.000.000	103.483.500	98.56
110	027	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	43.500.000	42.950.000	98.74
110	028	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Meubeulair, Dan Penghias Ruangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	129.500.000	87.920.000	67.89
110	029	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	53.440.848	52.290.000	97.85

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	030	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	164.300.000	146.842.000	89.37
110	031	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	856.625.000	783.418.400	91.45
110	032	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Komputer, Meubeulair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan, Dan Alat-Alat Studio Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.171.874.200	1.129.910.400	96.42
110	033	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	930.964.611	852.447.000	91.57
110	034	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Komputer, Dan Peralatan Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	329.000.000	320.450.000	97.40
110	035	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	212.751.768	210.407.000	98.90
110	036	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	640.900.000	623.310.800	97.26
110	037	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	229.800.000	227.963.400	99.20
110	038	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Meubeulair, Komputer, Alat Studio Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	553.227.000	527.711.000	95.39
110	039	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	422.844.649	417.437.300	98.72
110	040	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Komputer, Dan Instalasi Listrik Dan Telepon Seluler Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	338.500.000	279.076.600	82.45
110	041	Kegiatan Penyediaan Bahan Perkantoran, Perlengkapan, Komputer, Peralatan Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	463.878.153	447.810.800	96.54
110	042	Kegiatan Pematangan Tanah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek	226.250.000	225.040.000	99.47
110	043	Kegiatan Pengadaan Papan Nama Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	40.000.000	38.053.000	95.13

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	044	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Meubeulair Dan Peralatan Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	300.716.100	245.777.700	81.73
110	045	Kegiatan Pengadaan Penghias Ruangan Dan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	169.700.000	164.581.000	96.98
110	046	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	76.500.000	65.675.000	85.85
110	047	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	176.450.000	173.460.000	98.31
110	048	Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Komputer, Meubeulair, Dan Peralatan Dapur Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	183.550.000	175.030.000	95.36
110	049	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	214.626.044	208.744.000	97.26
110	050	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	217.773.690	215.903.000	99.14
110	051	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	108.320.000	105.232.000	97.15
110	052	Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	583.563.600	559.310.800	95.84
110	053	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Komputer Dan Meubeulair Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	376.676.768	362.648.700	96.28
110	054	Kegiatan Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanga Dan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	1.184.055.680	1.169.738.000	98.79
110	055	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Meubeulair, Komputer, Dan Alat Studio Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	344.673.937	341.117.400	98.97
110	056	Kegiatan Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanga Dan Konstruksi/Pembelian Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	737.484.000	728.781.000	98.82
110	057	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Peralatan Dan Alat Pengolahan Pertanian Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	95.389.866	86.478.900	90.66

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	058	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan, Meubeulair, Alat Studio, Instalasi Listrik, Hewan/Ternak Dan Pohon/Tanaman Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	333.825.756	295.568.000	88.54
110	059	Kegiatan Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	314.068.500	274.515.500	87.41
110	060	Kegiatan Pembangunan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Tahap I	27.722.144.656	27.274.167.543	98.38
110	061	Kegiatan Pembangunan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Tahap II	26.799.668.179	25.517.740.026	95.22
110	062	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis Tahap I	16.052.056.000	15.912.458.400	99.13
110	063	Kegiatan Pembangunan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Tahap II	6.621.674.000	6.487.272.650	97.97
110	065	Kegiatan Pembangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Tahap I	15.740.646.600	15.652.274.967	99.44
110	066	Pembangunan Gedung Kantor CPPD wil. Kab. Sukabumi I Cibadak	1.720.649.591	520.601.633	30.26
110	068	Kegiatan Permbangunan Gedung Puslia Tahap II (Sisa Pembayaran 5%)	535.949.700	525.272.700	98.01
110	069	Kegiatan Pengadaan Perangkat Command Centre dan Server Aplikasi Samsat	3.235.650.000	3.147.770.096	97.28
110	070	Kegiatan pengAdaan Kontruksi di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	148.500.000	148.252.000	99.83
110	071	Pengadaan Komputer Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	169.800.000	150.773.000	88.79
110	072	Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	232.300.000	223.855.000	96.36
111	111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.215.607.624	66.091.589.194	92.80
111	001	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor Dan Penyedia Materai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	4.649.982.930	4.183.064.844	89.96
111	002	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi, Jasa Komunikasi, Listrik Dan Bahan - Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	23.289.325.020	22.383.580.701	96.11

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	45.000.000	19.500.000	43.33
111	004	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	4.458.979.250	3.457.238.600	77.53
111	005	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.423.504.000	1.018.778.274	71.57
111	006	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	2.500.000.000	2.362.542.013	94.50
111	007	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	134.940.000	134.613.050	99.76
111	008	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundag - Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	121.756.000	110.410.983	90.68
111	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	97.500.000	83.442.778	85.58
111	010	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	87.306.750	85.927.625	98.42
111	011	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	141.800.000	108.833.680	76.75
111	012	Kegiatan Sewasarana Mobilitas Darat Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	54.600.000	54.600.000	100.00
111	013	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	24.000.000	24.000.000	100.00
111	014	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	108.844.000	105.328.000	96.77
111	015	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	445.900.000	445.826.200	99.98
111	016	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	110.000.000	109.355.783	99.41

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	017	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi , Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	42.840.000	42.840.000	100.00
111	018	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	31.500.000	29.924.100	95.00
111	019	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantordi Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	50.000.000	49.500.000	99.00
111	020	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	24.000.000	24.000.000	100.00
111	021	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	90.000.000	90.000.000	100.00
111	022	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Kunsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	289.074.039	289.005.900	99.98
111	023	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	179.700.000	178.743.900	99.47
111	024	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi ,Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bogor	95.200.000	84.771.109	89.05
111	025	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	144.800.000	137.756.750	95.14
111	026	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	290.000.000	284.500.000	98.10
111	027	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	84.000.000	70.920.000	84.43
111	028	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	338.860.000	232.576.755	68.64
111	029	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Kunsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan	431.127.772	308.579.600	71.57

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor			
111	030	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	195.485.921	194.147.500	99.32
111	031	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi ,Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	44.880.000	39.690.095	88.44
111	032	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	33.394.242	33.135.000	99.22
111	033	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	190.000.000	189.500.000	99.74
111	034	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	24.000.000	24.000.000	100.00
111	035	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	113.260.000	110.898.199	97.91
111	036	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	244.640.000	237.670.950	97.15
111	037	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	145.900.000	143.490.000	98.35
111	038	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	75.280.000	74.298.900	98.70
111	039	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	110.548.839	109.022.000	98.62
111	040	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	24.000.000	24.000.000	100.00
111	041	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	175.840.000	175.710.000	99.93

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	042	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	314.210.000	314.203.000	100.00
111	043	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	135.650.545	133.770.000	98.61
111	044	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi ,Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.Sukabumi I Cibadak	22.880.000	21.885.000	95.65
111	045	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	32.500.000	32.500.000	100.00
111	046	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	65.624.019	64.031.500	97.57
111	047	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	25.000.000	25.000.000	100.00
111	048	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	72.000.000	72.000.000	100.00
111	049	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	253.800.000	201.240.000	79.29
111	050	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	346.900.000	346.333.500	99.84
111	051	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	56.110.000	55.349.000	98.64
111	052	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu	19.390.000	13.384.940	69.03
111	053	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah	38.400.000	36.786.000	95.80

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu			
111	054	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	48.000.000	48.000.000	100.00
111	055	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	178.500.000	167.760.000	93.98
111	056	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	284.331.873	284.281.873	99.98
111	057	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	153.400.000	149.846.200	97.68
111	058	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cianjur	99.400.000	69.650.400	70.07
111	059	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	119.780.000	106.360.000	88.80
111	060	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	12.000.000	12.000.000	100.00
111	061	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	72.000.000	36.000.000	50.00
111	062	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	252.620.000	144.130.600	57.05
111	063	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	247.011.576	246.806.689	99.92
111	064	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	207.200.000	205.966.000	99.40

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	065	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	104.200.000	103.250.000	99.09
111	066	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	94.300.000	93.343.350	98.99
111	067	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	195.000.000	195.000.000	100.00
111	068	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	36.000.000	36.000.000	100.00
111	069	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	184.708.000	184.440.900	99.86
111	070	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	363.765.125	359.646.523	98.87
111	071	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	272.600.000	245.373.200	90.01
111	072	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	19.842.000	18.414.500	92.81
111	073	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	99.600.000	86.270.550	86.62
111	074	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	225.000.000	225.000.000	100.00
111	075	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	48.000.000	40.095.000	83.53
111	076	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	233.112.000	216.315.000	92.79
111	077	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan	257.992.000	250.983.990	97.28

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi			
111	078	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	197.000.000	195.425.337	99.20
111	079	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Karawang	93.600.000	89.123.600	95.22
111	080	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	176.500.000	60.795.324	34.44
111	081	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	81.700.000	80.508.800	98.54
111	082	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.092.500.000	1.092.500.000	100.00
111	084	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	60.000.000	60.000.000	100.00
111	085	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	210.540.000	206.940.000	98.29
111	086	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	347.060.784	328.482.632	94.65
111	087	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	115.690.000	113.088.230	97.75
111	088	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Purwakarta	67.566.800	61.172.500	90.54
111	089	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	86.130.500	86.130.500	100.00
111	090	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	54.500.000	53.686.000	98.51

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	091	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	48.000.000	48.000.000	100.00
111	092	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	178.800.000	178.573.000	99.87
111	093	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	281.954.893	281.654.500	99.89
111	094	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	151.275.000	150.626.000	99.57
111	095	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	26.600.000	17.848.000	67.10
111	096	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	90.800.000	88.892.000	97.90
111	097	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	60.000.000	60.000.000	100.00
111	098	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	246.600.000	245.980.000	99.75
111	099	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	203.328.669	203.001.869	99.84
111	100	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	150.600.000	148.475.900	98.59
111	101	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	51.000.000	44.064.432	86.40
111	102	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	57.000.000	50.063.600	87.83
111	103	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor	180.000.000	132.000.000	73.33

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon			
111	104	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	24.000.000	24.000.000	100.00
111	105	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	109.540.000	102.060.000	93.17
111	106	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	273.619.048	273.619.048	100.00
111	107	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	93.900.000	92.214.190	98.20
111	108	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	21.920.000	20.575.440	93.87
111	109	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	75.080.000	73.910.050	98.44
111	110	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	865.000.000	865.000.000	100.00
111	111	Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Darat Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	75.000.000	73.738.000	98.32
111	112	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	48.000.000	48.000.000	100.00
111	113	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	217.560.000	205.577.000	94.49
111	114	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	345.000.000	344.947.022	99.98
111	115	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	63.100.000	59.712.663	94.63

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	116	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug	19.400.686	18.442.500	95.06
111	117	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	36.900.000	35.005.900	94.87
111	118	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	48.000.000	47.760.000	99.50
111	119	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	177.840.000	172.785.000	97.16
111	120	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	295.000.000	274.893.486	93.18
111	121	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	113.902.474	113.283.000	99.46
111	122	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu I	79.600.000	61.940.875	77.82
111	123	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	81.120.000	76.554.550	94.37
111	124	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	60.000.000	55.380.000	92.30
111	125	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	216.120.000	206.062.200	95.35
111	126	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	269.500.000	269.248.957	99.91
111	127	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haureulis	87.330.000	85.895.000	98.36

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	128	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	95.768.042	78.087.000	81.54
111	129	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	85.600.000	83.500.000	97.55
111	130	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	556.000.000	551.000.000	99.10
111	131	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	36.000.000	36.000.000	100.00
111	132	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	150.300.000	128.160.000	85.27
111	133	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	242.000.000	241.946.500	99.98
111	134	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	150.580.000	144.297.000	95.83
111	135	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Kuningan	33.320.000	28.469.400	85.44
111	136	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	44.700.000	33.512.500	74.97
111	137	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	35.000.000	35.000.000	100.00
111	138	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	60.000.000	60.000.000	100.00
111	139	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	230.940.000	134.867.000	58.40
111	140	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja	240.463.320	239.742.780	99.70

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan			
111	141	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	168.000.000	167.238.900	99.55
111	142	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Majalengka	79.800.000	64.904.697	81.33
111	143	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	97.100.000	95.232.500	98.08
111	145	Kegiatan Sewa Mobilitas Darat Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	91.125.000	91.125.000	100.00
111	146	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	72.000.000	66.000.000	91.67
111	147	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	272.700.000	207.970.000	76.26
111	148	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	329.379.275	247.581.700	75.17
111	149	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	207.140.462	202.545.462	97.78
111	150	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	161.300.000	108.743.067	67.42
111	151	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	78.390.880	78.390.880	100.00
111	152	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	68.100.000	65.431.500	96.08
111	153	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantordi Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah	673.908.000	673.508.000	99.94

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran			
111	154	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	36.000.000	36.000.000	100.00
111	155	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	157.340.000	148.902.609	94.64
111	156	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	50.000.000	49.726.842	99.45
111	157	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	195.495.832	193.783.271	99.12
111	158	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	115.800.000	114.337.862	98.74
111	159	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Peggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	75.500.000	74.045.000	98.07
111	160	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	245.000.000	244.800.000	99.92
111	161	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	36.000.000	36.000.000	100.00
111	162	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	157.428.000	154.855.300	98.37
111	163	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	70.000.000	69.954.000	99.93
111	164	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	204.050.000	202.876.000	99.42

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	165	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	95.400.000	92.473.096	96.93
111	166	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	40.150.000	40.150.000	100.00
111	167	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	111.500.000	107.243.250	96.18
111	168	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	150.000.000	123.000.000	82.00
111	169	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	36.000.000	36.000.000	100.00
111	170	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	165.340.000	165.320.420	99.99
111	171	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	80.000.000	77.872.029	97.34
111	172	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	192.759.941	184.991.400	95.97
111	173	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	70.000.000	68.581.500	97.97
111	174	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	58.800.000	53.107.000	90.32
111	175	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	36.000.000	34.560.000	96.00
111	176	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	175.860.000	154.350.000	87.77
111	177	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan	100.700.040	100.700.040	100.00

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat			
111	178	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	161.500.000	160.520.600	99.39
111	179	Kegiatan Pengadaan Souvenir/Sosialisasi/ Dokumentasi Dan Publikasi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	61.647.000	59.537.500	96.58
111	180	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	52.000.000	49.598.000	95.38
111	181	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	48.000.000	48.000.000	100.00
111	182	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	195.660.000	194.927.000	99.63
111	183	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	169.581.197	169.489.000	99.95
111	184	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	163.114.297	159.447.000	97.75
111	185	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung II Soreang	66.800.000	65.568.375	98.16
111	186	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	74.740.000	71.045.500	95.06
111	187	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	36.000.000	36.000.000	100.00
111	188	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	186.540.000	184.260.000	98.78

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	189	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	225.000.000	224.944.600	99.98
111	190	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Wilayah Kabupaten Sumedang	126.950.000	125.678.806	99.00
111	191	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	64.763.128	57.030.250	88.06
111	192	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	38.100.000	36.546.900	95.92
111	193	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	72.000.000	72.000.000	100.00
111	194	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	259.800.000	246.720.000	94.97
111	195	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	233.734.393	225.278.750	96.38
111	196	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	133.623.000	132.823.000	99.40
111	197	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	70.540.000	50.721.623	71.90
111	198	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	52.396.000	48.751.050	93.04
111	199	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	96.000.000	91.200.000	95.00
111	200	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	325.050.000	211.970.250	65.21

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	201	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Kunsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	242.575.908	238.416.550	98.29
111	202	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	179.900.000	177.687.305	98.77
111	203	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	75.800.000	69.752.550	92.02
111	204	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	87.100.000	86.579.950	99.40
111	205	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	24.000.000	24.000.000	100.00
111	206	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	124.140.000	124.140.000	100.00
111	207	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Kunsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	329.423.977	329.414.700	100.00
111	208	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	119.396.000	119.346.000	99.96
111	209	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	87.050.000	86.450.000	99.31
111	210	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	37.100.000	36.687.500	98.89
111	211	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	140.000.000	140.000.000	100.00
111	212	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	108.000.000	68.400.000	63.33

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	213	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	363.860.000	257.770.000	70.84
111	214	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	291.607.452	288.420.000	98.91
111	215	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	145.261.000	144.180.812	99.26
111	216	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	47.600.000	34.041.100	71.51
111	217	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	54.480.000	49.617.200	91.07
111	218	Kegiatan Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	155.000.000	140.000.000	90.32
111	219	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	60.000.000	48.000.000	80.00
111	220	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	218.660.000	185.670.000	84.91
111	221	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	220.675.473	219.314.500	99.38
111	222	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	137.840.000	124.542.850	90.35
111	223	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	43.900.000	43.900.000	100.00
111	224	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	41.705.000	41.052.200	98.43

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	225	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	42.000.000	42.000.000	100.00
111	226	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	180.980.000	180.980.000	100.00
111	227	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	305.678.953	304.484.500	99.61
111	228	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	183.944.000	182.016.190	98.95
111	229	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	35.800.000	30.577.500	85.41
111	230	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	54.480.000	47.888.250	87.90
111	231	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	24.000.000	24.000.000	100.00
111	232	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	107.796.000	103.955.537	96.44
111	233	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	106.000.000	105.044.925	99.10
111	234	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	111.800.000	109.700.600	98.12
111	235	Kegiatan Pengadaan Souvenir, Dokumentasi Dan Publikasi Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	71.350.000	41.659.800	58.39
111	236	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	48.600.000	37.991.310	78.17
111	237	Kegiatan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	24.000.000	24.000.000	100.00

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	238	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	110.580.000	106.510.000	96.32
111	239	Kegiatan Rapat - Rapat Pengendalian/Pembinaan, Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	223.161.019	222.842.781	99.86
111	240	Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Penyediaan Bahan Perkantoran Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	161.760.000	157.459.080	97.34
111	241	Kegiatan Pengadaan Jasa Komunikasi Dan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	1.015.220.000	905.249.253	89.17
111	242	Kegiatan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	25.000.000	24.575.000	98.30
111	243	Kegiatan Pengadaan Jasa Profesi Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	115.711.960	107.025.520	92.49
111	244	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	45.000.000	43.658.650	97.02
111	245	Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Serta Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	701.618.320	678.867.263	96.76
55	55	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	643.150.000	635.612.600	98.83
	001	Kegiatan Pengelolaan Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	184.300.000	184.300.000	100.00
	002	Kegiatan Fasilitasi Teknik Penerapan Tik Pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	95.500.000	95.500.000	100.00
	003	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Switching E-Samsat	90.750.000	89.998.000	99.17
	004	Kegiatan Penyusunan Masterplan Tahun 2018-2023 Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	91.100.000	86.100.000	94.51
	005	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Integrasi System	90.750.000	90.120.000	99.31
	007	Kegiatan Penyusunan Aplikasi Mobile Info Kb (Kendaraan Bermotor)	90.750.000	89.594.600	98.73
98		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	455.650.000	446.565.820	98.01

PRO GRA M	KEGI ATA N	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	001	Kegiatan Dokumen Kinerja Tahunan	455.650.000	446.565.820	98.01
		Jumlah Belanja Langsung	332.151.489.673	309.779.509.648	93.26
		Jumlah Belanja Tidak Langsung	340.233.095.000	333.693.120.434	98.08
		Total Belanja	672.384.584.673	643.472.630.082	95.70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 4 dan 5.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Than 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana visi, menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Stratejik Tahun 2014 – 2017

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Kriteria Pencapaian Kinerja
			2014	2015	2016	2017	
1	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah	%	16.13	8.75	15.36	16,23	AA
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	82.029	86.54	84.40	78,67	AA
3	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	-	-	100.03	104,56	SB
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	9.218.671	14.736.803	16,085,121	17,3juta	SB
	b. Pajak Air Permukaan	wp	685	685	785	785	SB
	c. Pajak Bahan Bakar	Rupiah	2.119 T	21	24	30	SB
4	Jumlah Wajib Retribusi	wr	145	165	159	147	SB
5	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Jenis Objek Penerimaan	42	33	36	42	SB
6	Persentase Potensi wajib pajak yang terpungut	%	103.33	102.39	86,51	86,07	SB
7	Persentase Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	113.73	124.32	124.21	100,49	SB
8	Persentase Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	%	128,72	145,67	104,93	120	SB
9	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	% % %	39,54 18,16	38,83 16,36	39,00 21,00	40,44 21,69	SB
10	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	36,32	81,41	126,68	242,42	SB
11	Persentase aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	9,1	9,85	17,82	31,70	SB
12	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81,40	82,11	82,69	82,3	B
13	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan\ wp	1:284	1:233	1:192	1 : 246	SB
14	Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	%	96,38	96,23	100	100	SB
15	Persentase Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	80	85	90	100	SB
16	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	0,99	0,127	1,37	0.01	SB
17	Persentase Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	1,09	1,62	0,01	0.0275	SB
18	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi	kali	133,3	127,27	95,25	95,25	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Kriteria Pencapaian Kinerja
			Realisa si (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	
	yang melaksanakan hasil kesepakatan						
19	Persentase Defiasi pelaksanaan SOP dan SP	%	5,67	6	0	0	SB
20	Persentase Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	99,68	99,85	99,90	100	SB
21	Jumlah temuan SPI antar tahun	Temuan	99,68	99,85	350	333	SB
22	Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	94,44	100	100	n/a	SB
23	Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai	point	77,63	70,46	81,96	81,99	SB

Keterangan :

- PK : Pencapaian Kinerja
- Dilakukan Revisi Renstra pada Tahun 2015 dan 2016

Implementasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2017 mencakup 9 sasaran dengan 23 indikator sasaran, Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik,

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2017 dapat diuktisarkan sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 1 (satu) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi dan Analisis Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2013 – 2018, dalam pelaksanaannya memiliki 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3,1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 dan 2

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2017
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah antar tahun anggaran	%	10	16,23	162,30	153,60	AA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2017
			Target (%)	Realisasi (%)			
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana Boss)	%	85	78,67	93,66	100,48	AA

Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun 2016 – 2017

NO.	URAIAN	2016		2017		Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
		(Rp)	%	(Rp)	%		
1	PENDAPATAN DAERAH	27.694.035.120.859	105.54	32.189.552.633.142	102.61	4.495.517.512.283.00	16.23
1.1	Pendapatan Asli Daerah	17.042.895.113.672	106.43	18.106.718.727.362	105.76	1.063.823.613.690.00	6.24
1.1.1.	Pajak Daerah	15.727.483.589.791	104.76	16.483.079.173.742	105.48	755.595.583.951.00	4.80
1.1.2.	Retribusi Daerah	73.564.738.396	105.09	60.274.561.454	100.43	(13.290.176.942.00)	- 18.07
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	322.402.263.906	96.34	345.121.410.237	95.90	22.719.146.331.00	7.05
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	919.444.521.579	108.32	1.218.243.581.929	113.37	298.799.060.350.30	32.50
1.2	Dana Perimbangan	10.622.671.443.683	104.19	13.981.445.314.589	99.09	3.358.773.870.906.00	31.62
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	28.468.563.504	99.30	101.388.591.191	71.96	72.920.027.687.00	256.14

Tabel 3.1.1 Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun 2016 – 2017

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 27,694,035,120,859,00 sedangkan tahun 2017 tercapai sebesar Rp. 32.189.552.633.142,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.495.517.512.283,00 atau sebesar 16,23% terhadap tahun 2016 dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% sehingga capaian kinerjanya yaitu sebesar $16,23/10*100 = 162,30\%$ dengan Kategori Sangat Baik (SB)

Ketercapaian pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro yang relatif stabil sepanjang tahun 2017, telah mendorong berbagai macam aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, sehingga berdampak positif pada penerimaan pendapatan daerah. kebijakan nasional yang terkait dengan regulasi pengelolaan dana transfer dan stabilisasi harga bahan bakar minyak turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Selain itu ketercapaian pendapatan daerah dipengaruhi pula oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi, khususnya pada jenis penerimaan pajak daerah yang dikelola secara langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang sampai saat ini masih menjadi kontributor utama dalam struktur penerimaan pendapatan daerah.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus : } &= \frac{\text{Pendapatan Daerah 2017} - \text{Pendapatan Daerah 2016}}{\text{Pendapatan Daerah 2016}} \times 100\% \\
 &= \frac{32.189.552.633.142,00 - 27.694.035.120.859,00}{27.694.035.120.859,00} \times 100\% \\
 &= 16.23\%
 \end{aligned}$$

Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana Boss) yaitu Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 32.189.552.633.142,00 dikurangi Dana Boss Tahun 2017 sebesar Rp.11.217.904.141,00 menjadi sebesar Rp.23.272.509.300.118,00, sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 yaitu Rp.18.308.596.252.250,00.dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS/DAK) terealisasi sebesar 78.67% dari Target sebesar 84%: Capaian Kinerjanya yaitu= $73,75/84.00 \times 100\%$ sebesar 87,80% dengan kategori Memuaskan (A)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah 2017}}{\sum \text{Pendapatan Daerah 2017} - \sum \text{Dana Boss 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{18.106.718.727.362,00}{32.189.552.633.142,00 - 7.637.799.197.500,00} \times 100\% \\
 &= 73,75\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Realisasi Dana Boss Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 tercapai sebesar Rp. 7.637.799.197.500,00 sehingga capaian Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana Boss), sebesar 73.75% dari target sebesar 84%. Hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran proporsi anggaran dalam struktur pendapatan daerah, berdasarkan tingkat pertumbuhan antara PAD dan DAK pada periode tahun 2016-2017 dapat dilihat tingkat pertumbuhan PAD sebesar 4,80% sementara tingkat pertumbuhan DAK cukup signifikan sebesar 20,04% seiring dengan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi yang berdampak pada meningkatnya dana alokasi khusus untuk sektor pendidikan, baik untuk biaya operasional sekolah, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, sehingga mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 yang hanya mencapai 73.75% kategori Sangat Baik (BB)

Tabel 3,2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Terdatanya Potensi Pajak dan Bukan Pajak Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	100	104,56	104.56	100,03
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	17.6juta	17.3juta	98.30	100,53
	b. Pajak Air Permukaan	wp	785	785	100	100
	c. Pajak Bahan Bakar	Wapu	26	30	115,38	100,00
2	Jumlah Wajib Retribusi	wr	160	147	91,87	133,06
3	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD non pajak & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah)	objek	35	42	120.00	102,86

Jumlah Potensi Wajib Pajak Tahun 2017 terdiri dari :

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH	
		FUNGSI				
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	PKB					
	Sedan, Jeep, Station Wagon	1.840.880	20.480	83.745	1.945.105	
	Bus, Mikro Bus	8.561	1.416	20.764	30.741	
	Truck, Pick Up	496.919	6.876	59.361	563.156	
	Alat Berat	49	4	10	63	
	Sepeda Motor, Scooter	14.730.396	76.967	137	14.807.500	
	Jumlah Potensi PKB	17.076.805	105.743	164.017	17.346.565	
3	Jumlah Potensi Aper				785	

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH	
		FUNGSI				
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
4	Pajak Bahan Bakar KB				30	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT, AKR CORPORINDO Tbk 2. PT, SHELL INDONESIA 3. PT, BARIA BULK TERMINAL 4. PT, PERTAMINA PATRANIAGA 5. PT, SOLAR PREMIUM CENTRAL 6. PT, APEX INDOPACIFIC 7. PT, JASATAMA PETROINDO 8. PT, INTI LINGGA SEJAHTERA 9. PT, PERTAMINA (PERSERO) 10. PT, TOTAL OIL INDONESIA 11. PT, ELNUSA PETROFIN 12. PT, PETRO ENERGY 13. PT, PUTRA PERSADA PERMATA PRIMA PERKASA 14. PT, PRO ENERGI 15. PT, PETROLIN NIAGA ENERGI 16. PT, PATRA BUANA PUTRA 17. PT, ELMINDO CIPTA PERSADA 18. PT, PUNINAR MITRA ABADI 19. PT, TELEINDO PRAKARSA 20. PT. BEST OIL RESOURCES 21. PT, ABETA CAHAYA GEMILANG 22. PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA 23. PT. BAYU SINERGI 24. PT. NIAGA BUMI ENERGI 25. PT. KUTILANG PAKSI MAS 26. PT. SAMUDERA ETAM ENERGI 27. PT. EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA 28. PT. SUMA ADI JAYA 29. PT. MASINTON ABADI SENTOSA 30. PT. SUMATERA PETRO NIAGA 					

Tabel 3.2.1 Jumlah Potensi Wajib Pajak Tahun 2017

Sumber Data Pendapatan I dan Pendapatan II

Berdasarkan diatas didapatkan rata pencapaian Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{98,30 + 100 + 115,38}{3} \times 100\% \\
 &= 104,56
 \end{aligned}$$

sehingga capaiannya adalah 104,56% dengan kategori **Sangat Memuaskan (AA)**

Potensi Wajib Retribusi untuk Tahun 2017 terealisasi sebanyak 147 WR dari target sebanyak 160 WR sehingga capaian kinerjanya adalah $147/160 \times 100\% = 91,87\%$, Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan jumlah objek retribusi yang mengalami rehabilitasi gedung Samsat, sehingga untuk sementara beberapa Kantin dan beberapa sewa tempat foto copy dihentikan pemungutannya.

Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD Bidang Pendapatan II & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah) dari target sebanyak 35 jenis penerimaan dapat terealisasi sebanyak 42 jenis objek penerimaan sehingga capaiannya adalah 120,00 % dengan kategori **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3,3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Persentase Potensi wajib pajak yang Persentase terpungut	%	75	86,07	114,76	115,35
2	Persentase Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	90	100,49	111,65	146,13
3	Persentase Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	%	100	120	120,00	104,93

Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut yang terdiri dari dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	POTENSI			REALISASI		Capaian Efektifitas Pemungutan	
		FUNGSI			JUMLAH	JUMLAH		
		PRIBADI	DINAS	UMUM				
1	PKB							
	SEDAN, JEEP, STATION WAGON	1.840.880	20.480	83.745	1.945.105	1.514.964	77,89	
	BUS, MIKRO BUS	8.561	1.416	20.764	30.741	6.199	20,17	
	TRUCK, PICK UP	496.919	6.876	59.361	563.156	355.704	63,16	
	ALAT BERAT	49	4	10	63	32	50,79	
	SEPEDA MOTOR, SCOOTER	14.730.396	76.967	137	14.807.500	8.220.272	55,51	
	JUMLAH PKB	17.076.805	105.743	164.017	17.346.565	10.097.171	58,21	
2	APER	785			785	100,00		
3	PAJAK BAHAN BAKAR KB	24			24	100,00		
	RATA - RATA CAPAIAN = (58,21 + 100 + 95,83) / 3						86,07	

Tabel 3.3.1 Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber : Pendapatan I

Persentase potensi wajib pajak yang terpungut dari target 75% dari potensi yang ada (160 WR) yaitu sebesar 144 WR dapat terealisasi sebesar 147 WR sehingga realisasinya sebesar $147/144 \times 100\% = 102,08\%$, dengan demikian maka capaian kinejanya adalah = $102,08/90*100 = 120,00\%$ Kategori **Sangat Memuaskan (AA)**

Persentase potensi wajib retribusi yang terpungut dari target 90% dari potensi yang ada (160 WR) yaitu sebesar 144 WR dapat terealisasi sebesar 147 WR sehingga realisasinya sebesar $147/144 \times 100\% = 102,08\%$, dengan demikian maka capaian kinejanya adalah = $102,08/90*100 = 120,00\%$ **Sangat Memuaskan (AA)**

Persentase objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah,

Penerimaan	Target	Realisasi	%
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	359.866.552.681,00	345.121.410.237,00	95,90
Lain – Lain PAD yang Sah	1.074.550.561.121,00	1.420.359.247.632,00	132,18
Jumlah	1.434.417.113.802,00	1765480657869,00	123,08

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah dari target pencapaian sebesar 100 dapat terealisasi sebesar 95,90% dengan demikian capaian kinerjanya adalah $95.90/100 \times 100\% = 95,90\%$ **Sangat Memuaskan (AA)**

Penurunan capaian realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan disebabkan PT. Jaswita tidak melakukan penyetoran dan PT. Jasa Sarana hanya melakukan penyetoran dividen tahun anggaran 2017 saja atau tahun buku 2016, sementara dividen tahun buku 2015, sebesar Rp. 13.131.485.325 belum disetorkan.

Tabel 3,4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya kualitas SDM

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Percentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	% % %	35,1% 19,1%	40,44% 21,69%	114,92% 115,21% 113,56%	112,50 106,00 119,00
2	Percentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	78%	242,42%	310,80%	164,52
3	Percentase Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	12%	31,70%	264,17%	162,00

Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kelompok Pendidikan sampai dengan Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

- SD : 16 orang
- SMP : 13 orang
- SMA : 264 orang
- Sarjana Muda : 30 orang
- Strata 1 : 347 orang
- Strata 2 : 186 orang
- Jumlah : 858 orang

Percentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S1 sampai dengan Tahun 2017 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Aparatur S-1}}{\sum \text{Karyawan Bapenda 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{347}{858} \times 100\% = 40,44\%$$

Dengan demikian capaian kinerjanya adalah $40,44/35,31 \times 100\% = 115,21$ **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S2 sampai dengan Tahun 2017 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Aparatur S-2}}{\sum \text{Pegawai Bapenda 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{186}{858} \times 100\% = 21.69\%$$

Dengan demikian capaian kinerjanya adalah $21,69/19,1 \times 100\% = 113,56$ **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Berdasarkan table diatas bahwa setiap pengajuan ijin belajar harus online melalui skp.jabarprov.go.id karena sudah diatur kuota pemohon dan jurusan yang linier berdasarkan analisis dan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Teknis Subtantif yaitu sebanyak sampai dengan Tahun 2017 jika diasumsikan perhitungannya dari Tahun Anggaran 2014- 2017 yaitu sebagai berikut:

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)			
		2014	2015	2016	2017
1.	Bintek Pengelolaan Sistem Kearsipan	72	70	70	68
2.	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	72	70	-	-
3.	Bintek Pengelolaan Barang Daerah	72	70	70	-
4.	Bintek Pengelolaan Barang dan Jasa	50	70	70	-
5.	Bintek Aplikasi Samsat	50	70	70	-
6.	Bintek Perhitungan Pajak Daerah	-	70	70	68
7.	Bintek Penyelidikan dan Penyidikan Pajak Daerah bagi PPNS	-	-	30	-
8.	Bimtek dan Ujian Nasional Sertifikasi Barjas	-	-	-	59
9.	TOT Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	6
10.	Bimtek Teknik dan Penyusunan HPS	-	-	-	2
11.	Diklat Audit Operasional Pemda	-	-	-	12
12.	Diklat Dasar-dasar Audit	-	-	-	6
13.	Diklat Penyusunan RPJMD/Rentra	-	-	-	2
14.	Diklat Penyusunan LKIP	-	-	-	3

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)			
		2014	2015	2016	2017
15.	Diklat Pembinaan Manajemen Pengamanan	-	-	-	10
16.	Diklat TOT Legal Drafting	-	-	-	2
17.	Bimtek PDRD	-	-	-	18
18.	Bimtek Adm Fungsional Pranata Komputer	-	-	-	3
19.	Bimtek Sist. Akuntansi Pemerintah Akrual	-	-	-	1
20.	Diklat Manajemen Kearsipan	-	-	-	1
21.	Diklat Teknis Umum Penatausahaan Keuangan	-	-	-	4
22.	Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah	-	-	-	2
23.	Pembekalan Basic Life Support	-	-	-	2
24.	Training Integrated Human Resource Development Application	-	-	-	1
25.	Short Course Performance Appraisal	-	-	-	1
26.	Diklat Umum Adm. Kepegawaian	-	-	-	20
27.	Diklat Analis Jabatan	-	-	-	2
28.	Bimtek Intelejen	-	-	-	5
29.	Bimbingan Pemberkasan bagi PPNS	-	-	-	2
30.	Bimtek Manajemen Kepegawaian	-	-	-	8
31.	Reformulating Strategy In The Era Of Disruption	-	-	-	40
32.	Diklat Terpadu PTPK	-	-	-	5
33.	Diklat Widyaiswara	-	-	-	1
34.	Pembekalan Kewirausahaan bagi PNS	-	-	-	15
35.	Diklat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-	4
36.	Uji Kompetensi Bagi Pelaksana	-	-	-	572
37.	Bimtek Aplikasi Udin dan PI	-	-	-	2
	Jumlah Tahun	316	420	380	964
	Jumlah sampai dengan tahun 2017	2080			

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Bintek sd TA 2017}}{\sum \text{Pegawai Bapenda 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.080}{858} \times 100\% \quad 242,42 \%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $243.56/77 *100\% = 316,31$ dengan **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Berdasarkan tabel diatas Penataan ASN melalui Pendidikan dan Latihan adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat

mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. Penyiapan sumber daya aparatur yang cakap memang dituntut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat. Dan saat ini berdasarkan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pendidikan dan Latihan harus berkompetensi tetapi pada kenyataannya lembaga sertifikasi masih sedikit yang linier dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Persentase Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi yaitu sebagai berikut :

No,	Sertifikat Kompetensi Profesi	Jumlah Peserta (orang)			
		2014	2015	2016	2017
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	29	-	-	
2	Auditor	4	2	5	12
3	Perawat Gigi	-	1	-	
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	26	-	3	11
5	Akuntansi	10	-	-	-
6	Perpajakan	10	-	-	-
7	Jafung Analis Kepegawaian Tingkat Ahli	-	-	2	-
8	Jafung Arsiparis	-	1	-	3
9	Jafung Pustakawan	1			-
10	Penyusun Renstra SKPD	-	2	-	2
11	Sertifikasi Jaringan Komputer	-	4	-	4
12	Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP)	-	-	1	3
13	Penatausahaan Keuangan	-	-	2	4
14	Diklat Bidang Pendapatan	-	-	30	-
15	Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	6	15
16	Diklat Analis Jabatan				2
17	Diklat Teknis Manajemen Kearsipan	-	-	3	1
18	Diklat Manajemen Kepegawaian				8
19	Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual	-	-	16	1
20	Jafung Widya Iswara	-	-	-	1
21	Diklat TOT Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	6
22	Diklat TOT Legal Drafting	-	-	-	2
23	Bimtek Teknik dan Penyusunan HPS	-	-	-	2
24	Bimtek PDRD	-	-	-	18
25	Diklat Umum Adm. Kepegawaian	-	-	-	20
	Jumlah Tahun	79	10	68	115
	Jumlah sampai dengan Tahun 2017			272	

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$\sum \text{Peserta Sertifikat Kompetensi Profesi sd TA 2017}$$

=

LKIP Bapenda Provinsi Jawa Barat 2017

$$\begin{array}{r}
 \hline
 & \times 100\% \\
 \Sigma \text{ Pegawai Bapenda 2017} & \\
 \hline
 = \frac{272}{858} \times 100\% & = 31,70\%
 \end{array}$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $31,70/12 *100\% = 264,16\%$ dengan **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Terpenuhinya Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dikarenakan terdapat tambahan dari yang memiliki Sertifikasi barang dan Jasa Pemerintahan. Berdasarkan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pendidikan dan Latihan harus berkompetensi tetapi pada kenyataannya lembaga sertifikasi masih sedikit yang linier dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3,5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,7	82,3	99,52	100,23

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 ada sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 0,4 point namun demikian Bapenda Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan, baik peningkatan sarana prasarana pendukung, pengembangan jenis layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak, serta pengembangan infrastruktur strategis yang berkelanjutan sehingga untuk kenyamanan dan peningkatan pelayanan lebih representatif.

Capaian Kinerja IKM yaitu $= 82,3/82,7 \times 100\% = 99,52\%$ Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Tabel 3,6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

**Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan
Ketatalaksanaan Pelayanan Publik Yang Menopang Pengelolaan**

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	Sentra Layanan/ Jumlah Wajib Pajak	1 : 300	1 : 246	118	212,77
3	Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	95	100	105,26	111,12
4	Persentase Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	100	100	100	100

Lokasi pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor se-Jawa Barat terdiri dari :

No,	Lokasi Pelayanan	\sum Titik Pelayanan	Σ Hari Kerja dalam setahun
1.	Samsat Induk	34	294 hari
2.	Samsat Outlet	19	346 hari
3.	Samsat KCP	30	342 hari
4.	Samsat Drive Thru	2	294 hari
5.	Samsat Keliling	50	242 hari
6.	Samsat Gendong	68	242 hari
	Jumlah	135 Lokasi	
	Rata-rata pelayanan/tahun		303 hari

Realisasi Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pada tahun 2017 yaitu sebanyak 10.097.171 kbm yang dilayani oleh 135 lokasi sentra pelayanan selama rata-rata 303 hari dalam setahun sehingga Persentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Realisasi kbm tahun 2017}}{\sum \text{sentra layanan}} \\
 &= \frac{\sum 10.097.171 \text{ kbm}}{\sum 135 \text{ sentra layanan}} = 74.793,86 \text{ kbm/tahun} \\
 &= \frac{74.793,86}{303 \text{ hari}} = 246/\text{hari}
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja tahun anggaran 2017 adalah 1 sentra pelayanan dapat melayani 246 wajib pajak/hari sedangkan targetnya adalah 300 sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{(2 \times 300) - 246}{300} \times 100\% \\
 &= \frac{354}{300} \times 100\% \\
 &= 118
 \end{aligned}$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Ketersediaan SOP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	SK SOP	Jumlah SOP
1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 061/288 – Dispenda/2014	152
2.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 061/526 – Dispnda/2016 Tanggal 21 November 2016	52
	Jumlah	204

Jumlah Kebutuhan SOP Tahun sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 204 SOP sedangkan Target ketersediaan Standar Operasional Prosedur Tahun 2017 yaitu sebanyak 194 SOP atau 95% sedangnya realisasinya yaitu sebanyak 204 SOP atau (100%) sehingga Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan yaitu sebesar = $100/95*100 = 105,26\%$ kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Target ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tahun 2017 yaitu sebanyak 29 Standar Pelayanan atau (100%) dapat direalisasikan sebanyak 29 Standar

Pelayanan dengan demikian Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tercapai sebesar 100% dengan kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3,7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Percentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	1,4	0,01	199,28	116,79
2	Percentase Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	1,4	0,0275	198,04	16000

Laporan gangguan pelayanan titik pelayanan samsat Bulan Januari sd Desember 2017 diuraikan dalam table berikut ini :

1. Laporan gangguan pelayanan titik pelayanan samsat bulan januari 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
09/01/2017 9:10	Samsat KCP BJB Luragung	Down (kabel DC optik Putus)	135	Pelayanan normal kembali
13/01/2017 9:09	Samsat KCP BJB Cileungsing	Down (Kabel ke di dalam gedung putus di gigit tikus)	56	Pelayanan normal kembali
13/01/2017 15:42	Samsat Kab.Sukabumi I Cibadak	Down (Core optik putus di sisis OTB , kemungkinan ketekuk)	103	Pelayanan normal kembali
14/01/2017 11:40	Samsat Kab.Bandung I Rancaekek	Down (DC Putus)	122	Pelayanan normal kembali
24/01/2017 8:32	Samsat Kota Tasikmalaya	Down (DC OPTIK Putus)	136	Pelayanan normal kembali
30/01/2017 9:29	Samsat KCP BJB Ciwidey	Down, ada masalah di sisi catu daya pelanggan, UPS kebakar (Tidak ada issue di telkom)	256	Pelayanan normal kembali
		Jumlah		808 Menit

2. Laporan gangguan pelayanan titik pelayanan Samsat Bulan Februari 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
01/02/2017 8:13	Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta	Down (Ont rusak)	160	Pelayanan normal kembali
18/02/2017 10:44	Samsat Kab. Sumedang	Down	41	Pelayanan normal kembali
22/02/2017 8:02	Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta	Modem rusak (kena tikus)	61	Pelayanan normal kembali
22/02/2017 8:02	Samsat Kab. Majalengka	Down	61	Pelayanan normal kembali
				323 Menit

3. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Maret 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
07/03/2017 10:12	Samsat Kota Depok I	Down Core putus	125	Pelayanan normal kembali
11/03/2017 9:32	Samsat KCP BJB Sawangan	Down	250	Pelayanan normal kembali
29/03/2017 16:17	Samsat Kab. Sukabumi II Pel.Ratu	Down (Konfigurasi bubar)	27	Pelayanan normal kembali
				402 Menit

4. Laporan gangguan pelayanan titik pelayanan Samsat Bulan April 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
20/04/2017 10:02	Samsat KCP BJB Ciwidey	DROP Core putus	121	Pelayanan normal kembali
24/04/2017 11:15	Samsat Kota Bogor	Down (DC Putus ketarik bis)	184	Pelayanan normal kembali
26/04/2017 9:54	Samsat KCP BJB Cibarusah	Down	34	Pelayanan normal kembali
26/04/2017 11:25	Samsat Kab.Bandung I Rancaekek	Down KU OPTIK putus	236	Pelayanan normal kembali
				575 Menit

5. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Mei 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
02/05/2017 9:54	Samsat Outlet Baleendah	Gamas KU, 98 Core putus galian PLN (4 feeder kena)	480	Pelayanan normal kembali
02/05/2017 10:20	Samsat Outlet BSD	rekonfig ulang di OLT	36	Pelayanan normal kembali
08/05/2017 9:08	Samsat Outlet ITC Kebon Kalapa	Down (Modem normal)	29	Pelayanan normal kembali
15/05/2017 8:51	Samsat KCP BJB Cileungsri	Omzet sekunder	83	Pelayanan normal kembali
31/05/2017 10:58	Samsat KCP BJB Sawangan	Down (Gamas GPON 00 Parung)	72	Pelayanan normal kembali
				700 Menit

6. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Juni 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
05/06/2017 9:59	Samsat KCP BJB Cikajang	Down	114	Pelayanan normal kembali
12/06/2017 11:06	Samat KCP BJB Leuwiliang	Down	138	Pelayanan normal kembali
19/06/2017 9:41	Samsat Kota Bogor	Down (dc optik putus, kena bangunan)	307	Pelayanan normal kembali
21/06/2017 10:05	Samsat KCP BJB Arjawinangun	Down	87	Pelayanan normal kembali
				646 Menit

7. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Juli 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
02/07/2017 12:04	Samsat Outlet Baleendah	Down 8 ODP loss	280	Pelayanan normal kembali
12/07/2017 11:58	Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta	DC Putus	166	Pelayanan normal kembali
12/07/2017 13:57	Samsat Kota Sukabumi	I odp loss	72	Pelayanan normal kembali
21/07/2017 8:43	Samsat KCP BJB Surade	core optik ke corverter putus	133	Pelayanan normal kembali
26/07/2017 9:22	Samsat KCP BJB Babelan	Down	185	Pelayanan normal kembali
				836 Menit

8. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Agustus 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
15/08/2017 12:00	Samsat KCP BJB Leuwiliang	Down Msan Mati	64	Pelayanan normal kembali
18/08/2017 13:38	Samsat KCP BJB Leuwiliang	Down MSAN MATI	65	Pelayanan normal kembali
21/08/2017 9:40	Samsat Outlet Grage City	Down	81	Pelayanan normal kembali
28/08/2017 10:07	Samsat KCP BJB Arjawinangun	Down masalah di sisi catu daya pelanggan	6	Pelayanan normal kembali
				1.530 Menit

9. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan September 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
14-Sep-16 8:36	Samsat Outlet BTM	Down	82	Pelayanan normal kembali
14-Sep-16 9:40	Samsat KCP BJB Cileungsi	Down (Sekunder jelek)	1	Pelayanan normal kembali
				83 Menit

10. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Oktober 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
05-Okt-17 11:58	Samsat CPDP Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Gamas Metro area sukabumi	70	Pelayanan normal kembali
13-Okt-17 14:07	Samsat CPDP Pelabuhan Ratu	Gamas Metro area sukabumi	65	Pelayanan normal kembali
17-Okt-17 11:22	Samsat KCP BJB Luragung	Down (Ke arah ODC Putus)	15	Pelayanan normal kembali
				150 Menit

11. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan November 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
24-Nop-2017 15:01	Samsat KCP BJB Arjawinangun Sumber	Down (MSAN MRC Arjawinangun)	63	Pelayanan normal kembali
25-Nop-2017 08:58	Samsat Outlet Ciawi Sukaraja	Down	27	Pelayanan normal kembali
27-Nop-2017 08:02	Samsat CPDP Kab. Kuningan	Down	84	Pelayanan normal kembali
				174 Menit

12. Laporan Gangguan Pelayanan Titik Pelayanan Samsat Bulan Desember 2017

TANGGAL	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	LAMA GANGGUAN	KETERANGAN
04-Des-17 10:42	Samsat CPDP Kab. Kuningan	Down	24	Pelayanan normal kembali
23-Des-17 13:03	Samsat Outlet Salawu Sukaraja	Gpon S.parna config Hilang	41	Pelayanan normal kembali
			65 Menit	

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH TITIK LAYANAN	JAM LAYANAN (per tahun)
1	Samsat Induk	34	81.600
2	Samsat Outlet	19	45.600
3	Samsat KCP	30	72.000
4	Samsat Drive Thru	2	4.800
5	Samsat Keliling	50	75.000
6	Samsat Gendong	68	102.000
TOTAL JAM LAYANAN			381.000

Perhitungan Realisasi Tingkat Gangguan Jaringan Dan Sistem Samsat Online Sentralisasi

Dengan asumsi :

1. 1 tahun : 300 hari
2. Pelayanan samsat induk : 300 hari x 34 samsat induk x 8 jam= 81.600 jam
 Pelayanan samsat outlet : 300 hari x 19 samsat outlet x 8 jam= 44.288 jam
 Pelayanan samsat kcp : 300 hari x 30 samsat kcp bjb x 8 jam= 58.080 jam
 Pelayanan samsat Drive Thru : 300 hari x 2 samsat Drive Thru x 8 jam= 4.704 jam
 Pelayanan samsat keliling : 300 hari x 50 samsat keliling x 5 jam= 16.940 jam
 Pelayanan samsat gendong 300 hari x 68 samsat gendong x 5 jam= 94.380 jam

Total jam pelayanan : 381.000 jam

Total jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun : **6.292 menit / 104,86 jam**

Total jam pelayanan seluruh titik pelayanan : **381.000 jam**

Persentase jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun: $104,8/381.000 \times 100\% = 0,0275\%$

Khusus Samsat Induk CPPD telah memiliki Backup Link VPN sehingga gangguan yang terjadi pada link utama tidak berdampak terhadap jam pelayanan

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \\
 &= \frac{(2 \times 1,4) - 0,0275}{1,4} \times 100\% \\
 &= \frac{2,7725}{1,4} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 198,04$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Rekap sebaran perangkat IT lingkup Bapenda Provinsi Jawa Barat

NO	JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT	JUMLAH GANGGUAN PERANGKAT
1	Thin Client	1,426	9
2	Printer OKI 1120	427	7
3	Printer OKI 395	501	4
4	Printer High Speed	42	0
5	UPS	102	3
6	Router	152	2
7	Switch Hub	199	5
		2,849	30

Jumlah Perangkat seluruhnya: **2,849**

Jumlah Gangguan dalam setahun : **30**

Persentase gangguan dalam setahun : $30 / 2,849 \times 100\% = 0,01\%$

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \\
 \text{Rencana Tingkat Capaian} &= \frac{(2 \times 1,4) - 0,01}{1,4} \times 100\% \\
 &= \frac{1,83}{1,4} \times 100\% \\
 &= 199.28
 \end{aligned}$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3,8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

Meningkatnya Sinergitas Antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	%	90	95,25	105,82	105,82

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

No,	Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD	Capaian
1.	Rapat Identifikasi	1	1	54	48	88,89
2.	Rakor PBBKB	1	1	27	24	88,89
3.	Rapat Teknis PBBKB	3	3	27	24	88,89
4.	Rakor Pajak Rokok	1	1	27	24	88,89
5.	Rapat Koordinasi DBHCHT	1	1	27	24	88,89
6.	Rapat Koordinasi PPH	1	1	27	24	88,89
7.	Rekonsiliasi PAD	4	4	27	22	100,00
8.	Workshop	0	1	1	1	100,00
9.	Focus Group Discussion	0	1	1	1	100,00
10.	Rapat pembahasan Target	5	5	10	10	100,00
11.	SBO	5	5	10	10	100,00
12.	Rakor Lifting Migas	4	1	27	27	100,00
13.	Lifting	4	4	5	5	100,00
14.	Rekon Dana Bagi Hasil	4	4	5	5	100,00
	Jumlah	31	33	270	240	1333,33
		Rata-Rata Capaian				95,25
		Target Renstra				90,00

Dengan demikian maka realisasi Persentase Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan yaitu sebesar 95,25% sehingga bila dibandingkan dengan target 2017 maka Capaian Kinerja Tahun 2017 yaitu sebesar $95,25/90*100\% = 105,82\%$, kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3,9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya Ketepatan Dan Keakuratan Pelaporan Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1.	Prosentasi tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanna	%	10	0	200	100
2.	Persentase Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	96	100	104,17	106,29
3.	Jumlah temuan SPI antar tahun	%	300	305	101,67	105,10
4.	Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	100	N/A	N/A	100
5.	Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai	Point	81,5	81,99	100,60	100,57

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat 81,99 sehingga capaian kinerjanya adalah = $81,99/81,5 \times 100 = 100,60$ kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Berikut adalah Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)			
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	30,00	93,30%	27,99
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	10,00	91,39%	9,14
1	Renstra SKPD telah disusun	2,00	94,44%	1,89
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		Y	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0,75
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	100,00%	5,00
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1,00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1,00
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direview secara berkala		B	0,75
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	94,25%	18,85
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	93,75%	3,75
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		B	0,75
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00

10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	85,00%	5,10
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	81,25%	20,31
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	85,00%	10,63
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwanutanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0,75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50

C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	80,82%	12,12
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	93,75%	2,81
1 Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3 Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	76,14%	5,71
5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00
6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75
7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00
8 Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		B	0,75
9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33
10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75
11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	80,00%	3,60
12 Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13 Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75
14 Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75
15 Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75
16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75
D. EVALUASI INTERNAL (10%)	10,00	72,25%	7,23
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	93,75%	1,88
1 <i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2 <i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
4 <i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	69,50%	3,48
5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6 Evaluasi program <i>telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan</i>		B	0,75
7 Evaluasi program <i>telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan</i>		B	0,75
8 Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75
9 Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> <i>telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan</i>		C	0,50
10 Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> <i>telah menunjukkan perbaikan setiap periode</i>		B	0,67
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	62,50%	1,88

11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	71,69%	14,34
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	66,67%	5,00
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	186,75%	9,34
4	Target dapat dicapai			3,78
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,81
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	81,99%	81,99

Persentase penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian Laporan Bulanan selama kurun waktu tahun 2017 tercapai sebesar 100% dengan rincian terlampir

NO	CABANG PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	AGT	OKT	NOV	DES	RATA-RATA
1	WIL DEPOK I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	WIL DEPOK II CINERE	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
3	WIL KAB, BOGOR CIBINONG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	WIL KOTA BOGOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	WIL KOTA SUKABUMI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	WIL KAB, SKBMI I, CIBADAK	100,00	98,96	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74
7	WIL KAB, SKBMI II, PEL, RATU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	WIL KAB, CIANJUR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	WIL KOTA BEKASI	98,96	98,96	98,96	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,65
10	WIL KAB, BEKASI - CIKARANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	99,83
11	WIL KAB, KARAWANG	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83
12	WIL KAB, PURWAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	WIL KAB, SUBANG	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
14	WIL KOTA CIREBON	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
15	WIL KAB, CIREBON I SUMBER	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	WIL KAB, CIREBON II CILEDUG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	WIL KAB, INDRAMAYU I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
18	WIL KAB, INDRAMAYU II HGLS	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
19	WIL KAB, KUNINGAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	99,91
20	WIL KAB, MAJALENGKA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	WIL KOTA BDG I PADAJARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	WIL KOTA BDG II KAWALUYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	WIL KOTA BDG III S, HATTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	WIL KAB, BANDUNG BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	100,00	98,96	99,74
25	WIL KAB, BANDUNG I RANCASEKEK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	WIL KAB, BANDUNG II SOREANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	WIL KAB, SUMEDANG	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
28	WIL KAB, GARUT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
29	WIL KOTA TASIKMALAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	99,91
30	WIL KABUPATEN TASIKMALAYA SKRJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83
31	WIL KAB, CIAMIS I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	WIL KAB, CIAMIS II PGNDARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	WIL KOTA CIMahi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	WIL KOTA BANJAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Rata-Rata												99,90

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka Persentase penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dari target yang ditetapkan sebesar 96% tercapai sebesar 100 maka pencapaian kinerjanya adalah sebesar = $99,90/96 * 100\% = 104,06$ dengan kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016	JUMLAH TEMUAN 2017
1	Kota Depok I	7	5
2	Kota Depok II Cinere	14	4
3	Kabupaten Bogor	10	5
4	Kota Bogor	8	11
5	Kota Sukabumi	6	5
6	Kab, Sukabumi I Cibadak	6	8
7	Kab, Sukabumi II Pelabuhanratu	20	17
8	Kabupaten Cianjur	15	9
9	Kota Bekasi	14	14
10	kabupaten Bekasi	11	21
11	Kabupaten Karawang	7	11
12	Kabupaten Purwakarta	9	20
13	Kabupaten Subang	11	4
14	Kota Cirebon	12	11
15	Kab, Cirebon I Sumber	5	4
16	Kab, Cirebon II Ciledug	16	2
17	Kab, Indramayu I	9	6
18	Kab, Indramayu II Haurgeulis	13	8
19	Kabupeten Kuningan	6	8
20	kabupaten Majalengka	9	4
21	Kota Bandung I Pajajaran	4	5
22	Kota Bandung II Kawaluyaan	31	11
23	Kota Bandung III Soekarno-Hatta	5	3
24	Kabupaten Bandung Barat	8	7
25	Kab, Bandung I Rancaekek	9	6
26	Kab, Bandung II Soreang	10	4
27	Kabupaten Sumedang	9	8
28	Kabupaten Garut	4	5
29	Kota Tasikmalaya	6	10
30	Kabupaten Tasikmalaya	5	12
31	Kabupaten Ciamis	8	10
32	Kabupaten Pangandaran	14	20
33	Kota Cimahi	20	20
34	Kota Banjar	12	7
	Jumlah	333	305

Berdasarkan Tabel di atas Capaian Kinerja Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun adalah 98,33 Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan yaitu :

1. Tahun 2017 tidak dilakukan Pemutahiran atas temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat karena Tahun 2017 Inspektorat tidak melakukan Pemeriksaan paa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan regular Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) masih dalam proses sehingga belum dapat menyajikan Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan.

Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 yaitu sebesar 81,99 Kategori Memuaskan (A)

3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2017	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1.	Persentase kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	56,57%	50%	112,94%
		2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	78,67%	84%	93,65%
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	3.	Jumlah potensi wajib pajak, a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar	17,6 kbm 785 wp 30 Wapu	18,4juta kbm 785 wp 28 Wapu	97,78% 100% 125
		4.	Jumlah Wajib Retribusi	147 wr	170wr	86,47%
		5.	Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	42 objek	35 objek	120,00%
3,	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	6.	Persentase potensi wajib pajak/wajib pungut yang terpungut	86,07%	75%	114,76%
		7.	Persentase potensi wajib retribusi yang terpungut	124,21%	90%	138,01%
		8.	Persentase Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	100,49%	100%	100,49%
4,	Meningkatnya kualitas Aparatur	9.	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1	40,44% 21,69%	35,2% 19,2%	114,87% 112,87%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2017	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
		S2				
		10.	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substanstif	242,42%	79%	306,86%
		11.	Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi Profesi	31,70 %	13%	043,85%
5,	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	12.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30%	82,8%	99,40%
6,	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	13.	Prosentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	1:246	1:200	77,00
		14.	Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	100%	100%	100%
		15.	Persentase Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	100%	100%	100%
7,	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	16.	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	1,37%	1,2%	85.83%
		17.	Persentase Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	0.02275 %	1,2%	101,14%
8,	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	18.	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	100%	100%	100%
9,	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	19.	Persentase Tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	100%	100%	100%
		20.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat	100%	98%	102,04%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2017	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
			waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)			
	21.	Jumlah temuan SPI antar tahun		305%	250%	78,00%
	22.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan		100%	100%	100%
	23.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai,		81,99%	82,5%	99,38%

3.5 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Kinerja Dan Anggaran Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	10	16,24	162,40%	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	28.984.539.308,00	25.307.411.162,00	87,31%
2	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	10	16,24	162,40%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	455.650.000,00	446.565.820,00	98,01%
3	Meningkatnya kualitas aparatur	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S-1	35,2	40,44	114,89%	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	2.484.450.000,00	2.356.813.850,00	94,86%
4	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8	82,3	99,40%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	164.895.014.724,00	151.138.338.187,00	91,66%
5	Meningkatnya kualitas aparatur	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	79	242,42	306,86%	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	2.389.150.000,00	1.853.949.759,00	77,60%

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
6	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	1,2	1	83,33%	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	59.641.513.017,00	54.271.322.547,00	91,00%
7	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	96	100	104,17%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	304.355.000,00	263.016.500,00	86,42%
8	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	100	100	100,00%	Administrasi Perkantoran	71.215.607.624,00	66.382.031.601,92	93,21%
9	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100	100	100,00%	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1.138.060.000,00	1.042.225.600,00	91,58%
10	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	1,2	0,01	198,28%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	643.150.000,00	635.612.600,00	98,83%

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
			RATA-RATA :	123,43%					

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

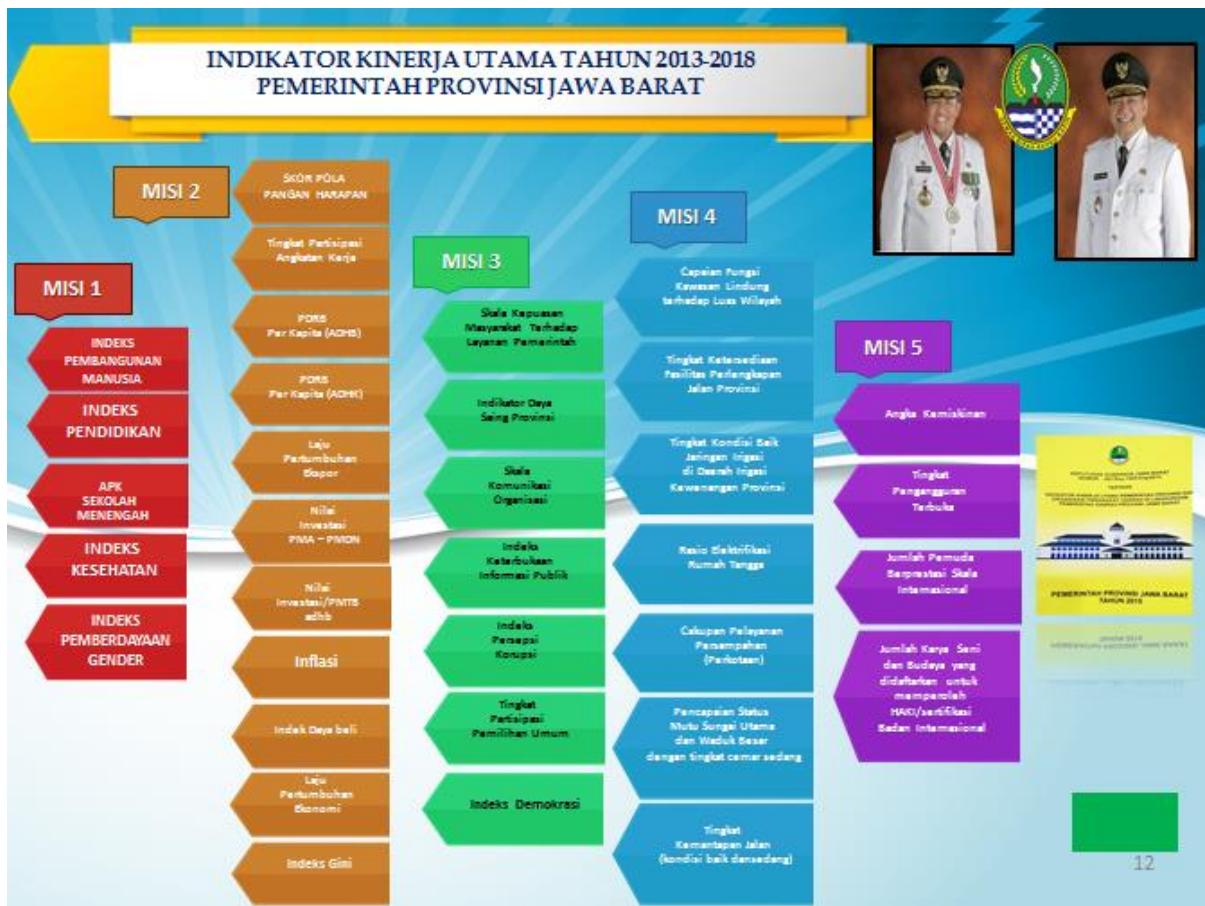
No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,6	89,87	10,13%
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah	Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	104,23	73,09	26,91%
3	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,6	66,83	33,17%
4	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	108,14	80,09	19,91%
6	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S-1	105,69	92,4	7,60%
7	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	164,52	87,19	12,81%
9	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	106,92	80,62	19,38%
10	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Penyampaian Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu dan Tepat Data	108,59	89,23	10,77%
12	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Jumlah Temuan SPI antar Tahun	100,86	94,12	5,88%

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

Secara keseluruhan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang dijabarkan dalam 10 Program dan 544 Kegiatan rata-rata capaiannya diatas 100% dengan serapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309.779.509.648 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 332.151.489.673 sehingga capaian Belanja Langsungnya adalah 93,26.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya terutama dukungan anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana straegis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

3,7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,



Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Keterangan
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1	Persentase kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Pendapatan Asli Daerah"
		2	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	
2	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah"
3	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	4	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Indeks Keterbukaan Informasi Publik"
		5	Persentase tingkat gangguan pengguna perangkat keras teknologi informasi	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama akan tercapai.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penyanga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal,

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi, Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Badan Pendapatan Daerah meliputi :

1. Badan Pendapatan Daerah merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah;
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Terdapatnya Cabang-Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi yang tersebarluar diseluruh Kabupaten /Kota se Jawa Barat yang merupakan sub unit

organisasi Badan Pendapatan Daerah disertai dengan outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi,misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah,
2. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “prinsip-prinsip customer relationship” yang makin nyamanMasih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah,
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji,
4. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor non pajak masih harus ditingkatkan seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak pada kategori premium, dan kerjasama pengelolaan bersama asset di lingkungan Bapenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai (contoh: asrama dan fungsi food court);

Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi, Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat,
4. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi, baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru,

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun, kiranya penyusunan LKIP ini dapat memberikan